

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada DPRD Kota Surakarta)

Asep Nanda Paramayana¹, Riana Rachmawati Dewi², Agni Astungkara³

Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta

asepnandap@gmail.com, rianardewi1@gmail.com, astungkaraagni@gmail.com

Corresponding Author

Diajukan : 26 Juli 2022

Disetujui : 1 Agustus 2022

Dipublikasi : 1 September 2022

ABSTRACT

Government financial statements are intended to provide information useful for decision-making and represent the reporting entity's responsibility for entrusted resources. While financial reporting is required, access to and monitoring of financial reporting quality to enhance accountability in regional financial management. The purpose of this study was to determine the effect of the presentation of financial statements, accessibility, and supervision on the accountability of regional financial management of the Surakarta City DPRD. This research is quantitative. The population consists of 44 employee of the Surakarta City DPRD. The number of samples is 44 employee of the Surakarta City DPRD. The data analysis technique used multiple linear regression analysis. This research is indicated by the results of the presentation of financial statements that affect the accountability of regional financial management to the Surakarta City DPRD. Accessibility affects the accountability of regional financial management to the Surakarta City DPRD. Supervision of the quality of financial reports affects the accountability of regional financial management to the Surakarta City DPRD. The sample is only 44 employee of the Surakarta City DPRD. If the number of samples is increased, better results are likely to be obtained. The next researcher, can add the number of samples of other research objects.

Keywords: *Accessibility, Accountability of Regional Financial Management, Financial Statement Presentation, and Quality Control of Financial Reports.*

PENDAHULUAN

Sebagaimana Undang-Undang No.23 Tahun 2010 mengenai Pemerintah Daerah akuntabilitas bukan saja terletak pada pemerintah pusat namu pada pemerintah daerah juga. Pemerintah tingkat pusat memiliki kewajiban pengaruh untuk meminta akuntabilitas pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah (Karyatni & Handajani, 2020).

Untuk meningkatkan akuntabilitas, diperlukan penyajian pelaporan keuangan, aksesibilitas, dan pengawasan kualitas laporan keuangan. Aksesibilitas adalah seberapa mudah seseorang dapat memperoleh informasi tentang laporan keuangan. Efektifitas aksesibilitas tergantung akses publik dalam membaca dan memahami laporan keuangan. Kemudahan akses pemakai laporan harus difasilitasi pemerintah daerah (Kurniawati, 2016).

Pengawasan optimal yang didasarkan standar akuntansi keuangan pemerintah oleh instansi pemerintah mengenai kualitas laporan keuangan, menjadikan laporan keuangan tersaji secara akurat dan wajar sehingga pengguna dapat menjadikan sebagai bukti. Peningkatan

akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilakukan dengan pemantauan kualitas pelaporan keuangan yang optimal dan tepat sehingga pekerjaan pemerintah optimal. Selain itu, untuk melaksanakan praktik pemberantasan korupsi untuk mewujudkan *good governance* di tingkat pusat maupun daerah (Reyhan, 2017: 6).

Pemerintah Kota Surakarta wajib menyampaikan laporan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, terdapat berbagai kendala dan permasalahan dalam penyajiannya. Apalagi Pemerintah Kota Surakarta belum mengetahui pentingnya tanggung jawab keuangan. Penggunaan dana dan pembelanjaan kebutuhan dana tidak diketahui warga karena tidak dipublikasi. Sebagai wajib pajak, masyarakat tentunya menginginkan transparansi untuk mewujudkan akuntabilitas.

Penelitian Lewier & Kurniawan (2016), penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas. Penelitian Sweetenia (2019), penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas dan Penelitian Safutra *et.al* (2019), penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas.

Penelitian Lewier & Kurniawan (2016), aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas. Penelitian Safutra *et.al* (2019), aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas. Penelitian Hulu, *et.al*, (2020), aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas. dan Penelitian Kurniawati (2016), aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas. Sebaliknya, penelitian Hulu, *et.al*, (2020), penyajian tidak mempengaruhi akuntabilitas. Penelitian Aprila (2015), aksesibilitas tidak mempengaruhi akuntabilitas.

Sehingga, penelitian ini menguji kembali pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada DPRD Kota Surakarta.

STUDI LITERATUR

Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan berdasar Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai bagian dari pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala daerah, (Apriliani, *et al*, 2015). Penyajian laporan keuangan pemerintah yang baik, akan meningkatkan akuntabilitas (Lewier & Kurniawan, 2016). Penelitian Lewier & Kurniawan (2016), penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas. Penelitian Sweetenia (2019), penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas dan Penelitian Safutra *et.al* (2019), penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas. Perumusan hipotesisnya:

H₁: Penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas.

Aksesibilitas adalah seberapa mudah seseorang dapat memperoleh informasi tentang laporan keuangan. Efektifitas aksesibilitas tergantung akses publik dalam membaca dan memahami laporan keuangan. Kemudahan akses pemakai laporan harus difasilitasi pemerintah daerah (Kurniawati, 2016). Penelitian Lewier & Kurniawan (2016), aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas. Penelitian Safutra *et.al* (2019), aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas. Penelitian Hulu, *et.al*, (2020), aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas. dan Penelitian Kurniawati (2016), aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas. Perumusan hipotesisnya:

H₂: Aksesibilitas mempengaruhi signifikan akuntabilitas.

Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengukur pencapaian hasil, menilai pelaksanaan, serta memperbaiki jika diperlukan. Pengawasan kualitas laporan keuangan yang baik menjadikan akuntabilitas meningkat. Penelitian Darma (2019), pengawasan mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah. Perumusan hipotesisnya:

H₃: Pengawasan kualitas laporan keuangan mempengaruhi signifikan akuntabilitas.

METODE

Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Indikator akuntabilitas meliputi 6 indikator. Penyajian meliputi 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010), aksesibilitas terdiri dari 5 indikator yaitu kemudahan mendapatkan informasi secara terbuka di media massa; mudah untuk diakses; ketersediaan di situs resmi Pemerintah Kota Surakarta, serta dapat dipahami. (Muthmainnah, 2015), dan pengawasan terdiri dari 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat). Populasi merupakan sekumpulan unsur dengan ciri tertentu ciri tertentu untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2017). Populasi sebanyak 44 pegawai DPRD Kota Surakarta. Sampel sejumlah 44 pegawai DPRD Kota Surakarta. Teknik analisis data dengan regresi linier berganda.

HASIL

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1 (Constant)	0,369	3,678		0,100	0,921
Penyajian_ Laporan	0,197	0,097	0,243	2,041	0,048
Pertanggungjawaban Aksesibilitas	0,532	0,120	0,522	4,429	0,000
Pengawasan_Kualitas Laporan_Keuangan	0,116	0,052	0,250	2,222	0,032

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: *Output SPSS 22*

$$Y = 0,369 + 0,197 X_1 + 0,532 X_2 + 0,116 X_3$$

Artinya :

Nilai α (konstan) = 0,369, apabila terdapat penilaian penyajian, aksesibilitas, dan pengawasan, maka akuntabilitas akan meningkat. Nilai $\beta_1 = 0,197$, peningkatan penyajian menyebabkan peningkatan akuntabilitas. Nilai $\beta_2 = 0,532$, jika terjadi peningkatan penilaian aksesibilitas, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat. Nilai $\beta_3 = 0,116$, jika terjadi peningkatan penilaian terhadap pengawasan, menyebabkan peningkatan akuntabilitas.

Tabel 2
Hasil Uji Hipotesis

No	Variabel		t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Kesimpulan
1	Penyajian keuangan	laporan	2,041	2,021	0,048	Diterima
2	Aksesibilitas		4,429	2,021	0,000	Diterima
3	Pengawasan	kualitas laporan keuangan	2,222	2,021	0,032	Diterima

Sumber: *Output SPSS 22*

Penyajian mempengaruhi akuntabilitas, hal ini ditunjukkan dengan nilai sig. 0,048 < 0,05. Aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas, hal ini ditunjukkan dengan nilai sig 0,000 <

0,05. Pengawasan kualitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas yang ditunjukkan nilai sig. $0,032 < 0,05$.

Tabel. 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,709 ^a	0,503	0,466	2,714

Sumber: *Output SPSS 22*

Nilai *adjusted R Square* (R^2) dalam penelitian ini sebesar 0,466. Sehingga dapat diartikan bahwa variasi variabel independen yang terdiri dari penyajian laporan keuangan (X1), aksesibilitas (X2), dan pengawasan kualitas laporan keuangan (X3) terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada DPRD Kota Surakarta sebesar 46,6%, sedangkan sisanya sebesar 53,4% dipengaruhi oleh faktor yang lainnya.

PEMBAHASAN

Penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada DPRD Kota Surakarta (t hitung $2,041 > 2,021$, sig. $0,048 < 0,05$). Artinya apabila penyajian laporan keuangan baik maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada DPRD Kota Surakarta akan semakin baik. DPRD Kota Surakarta yang melakukan penyajian informasi laporan keuangan secara lengkap akan mewujudkan akuntabilitas yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Lewier & Kurniawan (2016), penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Sweetenia (2019), penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penelitian Safutra *et.al* (2019), penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah pada DPRD Kota Surakarta (t hitung $4,429 > 2,021$, sig. sebesar $0,000 < 0,05$). Artinya apabila aksesibilitas semakin mudah maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada DPRD Kota Surakarta akan semakin baik. Kemudahan masyarakat memperoleh informasi mengenai laporan keuangan sangat menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah pada DPRD Kota Surakarta. Hal ini sejalan dengan penelitian Lewier & Kurniawan (2016), aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Safutra *et.al* (2019), aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Hulu, *et.al*, (2020), aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. dan Penelitian Kurniawati (2016), aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada DPRD Kota Surakarta (t hitung $2,222 > 2,021$, sig. sebesar $0,032 < 0,05$). Artinya apabila pengawasan kualitas laporan keuangan baik maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada DPRD Kota Surakarta akan semakin baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Darma (2019), pengawasan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pada DPRD Kota Surakarta. Aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas pada DPRD Kota Surakarta. Pengawasan mempengaruhi akuntabilitas pada DPRD Kota Surakarta. Sampel hanya sebesar 44 pegawai DPRD Kota Surakarta. Apabila jumlah sampel ditambahkan, kemungkinan akan didapatkan hasil yang lebih baik. Peneliti berikutnya, dapat menambahkan jumlah sampel objek penelitian yang yang lain

REFERENSI

- Apriliani, N. K., *et al.* (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, dan aksesibilitas terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klungkung). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No 1 Tahun 2015)*.
- Darma, D. A. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah . *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik Vol. 9 No.2 Februari 2019*.
- Hulu, S., *et al.* (2020). Analysis of Determinants Accountability for Regional Financial Management in the Regional Government of North Nias Regency. *International Journal of Innovative Science and Research Technology Volume 5, Issue 9, September – 2020*.
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota ambon. *Jurnal UNISSULA*.
- Karyatni, N. M., & Handajani, L. (2020). The Quality of Financial Statements Antecedents and Consequences Towards Financial Accountability. *International Journal of Social Science and Business. Volume 4, Number 3, Tahun 2020, pp. 352-362*.
- Kurniawati, M. M. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat t Daerah Kabupaten Jember). *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2016*.
- Lewier, C. N., & Kurniawan, C. H. (2016). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten. *Jurnal Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Muthmainnah, W. N. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara*. Skripsi: Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)).
- Reyhan, M. (2017). *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada SKPD Propinsi Sumatera Utara)*. Skripsi: Program Studi Strata-1 Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara Medan 2017.
- Safutra, W., *et al.* (2019). The Effect of Regional Financial Statement Presentation and Regional Financial Statement Accessibility on Regional Financial Management Accountability in the District of Bener Meriah, Province of AcAceh, Indonesia. *East African Scholars J Econ Bus Manag; Vol-2, Iss-12 (Dec, 2019): 798-804*.
- Sanusi, A. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Sweetenia, A. M., *et al.* (2019). Pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, dan kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pemerintah desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi Vol. 17 No.1 (2019) pp. 44-56*.